

Judul : Arab Saudi Izinkan Visa Turis - Segera Legalkan Umrah Mandiri
Tanggal : Jumat, 01 Maret 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Arab Saudi Izinkan Visa Turis Segera Legalkan Umrah Mandiri



Hidayat Nur Wahid

ANGGOTA Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid mendesak Pemerintah segera menyusun aturan yang membolehkan masyarakat melaksanakan umrah secara mandiri. Hal ini menyusul kebijakan Pemerintah Arab Saudi mengizinkan Warga Negara Asing (WNA) umrah dengan menggunakan visa turis.

Hidayat menuturkan, Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak berumrah harus melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Penyelenggara umrah itu adalah biro travel yang terdaftar dan berizin di Kementerian Agama (Kemenag). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, tepatnya di pasal 86 ayat 1 dan 2.

Namun seiring dengan kebijakan baru dari Pemerintah Arab Saudi tersebut, calon jemaah umrah cukup mengakses langsung dengan memesan tiket pesawat dan mendaftarkan diri di Aplikasi Nusuk. Aplikasi ini disediakan dan telah disosialisasikan oleh pihak Pemerintah Saudi Arabia.

"Artinya kini sangat mudah bagi warga dunia termasuk Indonesia untuk menjalankan ibadah umrah. Dan itu yang sudah dinikmati para calon jemaah umrah dari seluruh dunia," katanya.

Untuk itu, dia mendorong Pemerintah merevisi Pasal 86 di UU Nomor 8 Tahun 2019 tersebut, sehingga masyarakat yang hendak umrah secara mandiri dengan biaya lebih terjangkau bisa terfasilitasi.

"Poin perubahannya dengan menambahkan redaksi boleh penyelenggaraan ibadah umrah oleh perseorangan atau kelompok masyarakat," usulnya.

Dengan revisi tersebut, lanjutnya, maka aturan umrah di Indonesia bisa menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di Arab Saudi. Ini semata-mata agar umrah dengan biaya terjangkau secara mandiri, atau yang biasa juga disebut umrah backpacker, diperbolehkan dan tidak dilarang.

"Tentunya ketentuan baru itu juga tetap mengharuskan hadirnya negara untuk melindungi semua warga, termasuk jemaah umrah mandiri atau backpacker itu," sambung wakil ketua MPR ini.

Dia juga meminta biro travel tidak perlu khawatir dengan aturan baru di Arab Saudi yang memperbolehkan visa turis untuk umrah.

Toh, jika umrah mandiri ini dilegalisasi, masing-masing perjalanan umrah atau biro travel sudah memiliki ceruk jamaahnya sendiri dengan beragam fitur pelayanan.

"Regulasi baru ini justru bisa mendorong biro travel umrah semakin profesional," tegasnya.

Politisi PKS ini yakin, kebijakan legalisasi umrah dengan visa turis ini akan bisa mengoreksi dan menghapuskan biro travel umrah bermasalah. Mereka acap kali menjanjikan keberangkatan dengan harga murah, tapi tidak sesuai janji.

"Dengan adanya regulasi yang baru nantinya, para jemaah akan memilih umrah mandiri dibandingkan terpapar risiko gagal berangkat, atau gagal melaksanakan umrah dengan baik," katanya. ■ KAL